**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru (WUB) Jawa Barat merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018. Melalui program ini akan dicetak sebanyak seratus ribu wirausaha baru dari berbagai sektor usaha. Kegiatan ini bukan hanya menyerap tenaga produktif tetapi menjadi sumber inspirasi dalam mendayagunakan potensi yang dimiliki dalam bentuk penciptaan lapangan kerja.

Dalam pelaksanaannya program ini dilaksanakan oleh 13 (tiga belas) OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing seperti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Barat, Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil melalui UPTD Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Kecil (Balatkop) ditunjuk sebagai kordinator pelaksana program bersama OPD terkait yang khususnya pada bidang makanan dan minuman, konveksi, fashion dan jasa salon.

Program wirausaha baru memberikan kesempatan kerja pada banyak masyarakat. Koperasi dan Usaha Kecil sudah memberikan pengaruh yang positif bagi Indonesia sejak adanya krisis global yang memberikan efek negatif pada perekonomian beberapa negara. Koperasi dan Usaha Kecil menjadi menyelamatkan perekonomian Indonesia dan menjadi satu-satunya solusi pertumbuhan ekonomi. Ketika krisis global terjadi beberapa waktu lalu, perekonomian indonesia masih tetap stabil dan tetap menunjukkan pertumbuhan. Hal itu semakin diperkuat oleh pernyataan Koperasi dan Usaha Kecil sangat penting karena mampu menciptakan pasar baru, mengembangkan perdagangan, mengelola sumber daya alam, mengurangi kemiskinan, serta membangun masyarakat dan menghidupi keluarga mereka tanpa kontrol dan fasilitas dari pihak pemerintah daerah yang memadai.

Sasaran program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru adalah masyarakat, mahasiswa dan pelajar, bidang yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah jenis usaha makanan dan minuman termasuk kedalam jenis usaha mikro kecil menengah karena produksinya dilakukan berdasarkan industri rumahan oleh pelaku usaha itu sendiri tanpa melibatkan kerja sama dari pihak lain dan menggunakan modal terbatas, jasa salon termasuk juga dalam usaha mikro kecil menengah karena usahanya tidak berbentuk CV/PT tetapi dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri dan menggunakan modal terbatas dan konveksi termasuk dalam usaha mikro kecil menengah karena produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dengan skala besar berbeda dengan konveksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu..

Peserta program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru adalah wirausaha baru yang didefinisikan sebagai individu yang telah terseleksi sebagai peserta dalam program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru dan telah berusaha antara 0 sampai dengan 5 tahun, serta memenuhi persyaratan yang diatur oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 79 Tahun 2015 tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Provinsi Jawa Barat.

Para peserta program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru ini harus melewati beberapa tahap seleksi untuk ikut serta dalam program, yaitu:

1. Mendaftarkan diri secara *online* melalui www.wirausahabarujabar.net
2. Mengikuti tes *online* setelah lulus verifikasi kelengkapan administrasi
3. Menjalani proses wawancara
4. Pelatihan dan magang
5. Pendampingan usaha.

. Pada tahun 2016 terdapat 2000 orang wirausaha baru sejawa barat yang diseleksi untuk dijadikan peserta pelatihan pada program Pencetakan Wirausaha Baru, dari bidang usaha makanan dan minuman sebanyak 1200 orang, bidang usaha konveksi/jahit 600 orang dan bidang usaha jasa salon 200 orang wirausaha baru.

Dari 2000 orang wirausaha baru yang lolos seleksi UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil menunjuk 5 orang koordinator dan 90 orang pendamping.

Wirausaha baru lolos seleksi diberikan pelatihan. Pelatihan yang dimaksud adalah pemberian pembelajaran secara praktis dalam waktu yang relatif singkat oleh seseorang yang ahli kepada orang lain (peserta) dengan tujuan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan atau persoalan secara sendiri yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap atau nilai-nilai yang benar dalam mengembangkan wirausaha baru dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan pelatihan.

Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 sektor wirausaha merupakan sektor yang tangguh dan berdaya tahan prima terhadap terpaan badai krisis, karena wirausaha memiliki tingkat adaptasi yang tinggi sehingga ketika terjadi perubahan akan cepat menyesuaikan diri. Para wirausaha baru dengan berbagai keterbatasannya perlu difasilitasi, digerakan dan dimotivasi sehingga semakin berkembang naluri kewirausahaannya dengan upaya-upaya terpadu dan terencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya di Kota Bandung berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai kesempatan wirausaha didalam berbagai bidang oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provisinsi Jawa Barat.

Namun usaha tersebut terkendala dari pihak pewirausaha itu sendiri. Adapun serangkain permasalahannya yaitu permasalahan sumber daya manusia yang rendah**.** Hal ini terbukti berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dalam era globalisasi seperti saat ini, seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan dan pandangan yang luas dan jauh kedepan, sehingga mampu membaca berbagai situasi perubahan dan mampu mencari alternatif terbaik dalam berbagai permasalahan yang di hadapi dalam berwirausaha. Selain itu, wirausahawan juga harus mampu mengembangkan diri serta memiliki motivasi yang kuat dalam berusaha di Kota Bandung.

 Melihat kendala tersebut, maka Dinas Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat merasa perlu melakukan program terhadap wirausaha baru yang salah satunya adalah meningkatkan mutu SDM (sumber daya manusia) wirausahawan dan membangun wirausahawan untuk memiliki jiwa Entrepreneurship, sehingga dengan hal itu wirausahawan akan memiliki mutu SDM dan daya saing yang baik, akan mampu mewujudkan sistem pendukung usahanya yang kondusif, akan mampu meningkatkan koordinasi usahanya keberbagai sumber daya yang salah satunya akan mudah menuju akses pemasaran, serta akan mewujudkan wirausaha yang utuh dan mandiri.

Melihat latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi program wirausaha baru (WUB) di Kota Bandung”.

**1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diungkapkan maka peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian ini terhadap “Implementasi Program Wirausaha Baru (WUB) di Kota Bandung pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat”.

**1.3 Perumusan Masalah**

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas peneliti merumusakan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Implementasi Program Wirausaha Baru (WUB) di Kota Bandung pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinvsi Jawa Barat?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada Implementasi Program Wirausaha Baru (WUB) di Kota Bandung pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi hambatan pada implementasi program wirausaha baru?

**1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.4.1 Tujuan Penelitian**

 Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini tujuan dari peneliti adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program wirausaha baru di Kota Bandung pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan program wirausaha baru di Kota Bandung pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi hambatan pada implementasi kebijakan wirausaha baru

**1.4.2 Kegunaan Penelitian**

1. **Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori – teori yang peneliti peroleh tentang Implementasi Kebijakan.

1. **Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharap kan dapat dijadikan bahan referensi mengenai implementasi bagi organisasi pemerintahan yang dimana sebagai pemegang kebijakan khususnya pada program wirausaha baru.

1. **Kegunaan Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman peneliti khususnya mengenai ilmu pemerintahan, kebijakan dan kinerja organisasi pemerintahan.

1. **Kegunaan Bagi Pihak Umum**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak umum yang menaruh perhatian dan mina tuntuk mengkaji lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja organisasi pemerintahan dalam pengelolaan operasional pasar tradisional.

**1.5 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari Implementasi Kebijakan Wirausaha Baru di Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat maka dalam penelitian ini dibuatkanlah kerangka pemikiran. Sehingga dengan adanya kerangka pemikiran ini, baik peneliti maupun pembaca dari penelitian ini mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai peneliti.

 Penelitian ini diawali dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah yaitu permasalahan sumber daya manusia yang rendah.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dikaji dengan pijakan teori Implementasi Kebijakan model **George C.Ewards III**. Menurut **Edwards III** ada 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Yang petama komunikasi, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini akan berjalan bila komunikasi juga bejalan dengan baik, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Indikator untuk menentukan keberhasilan variabel komunikasi adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi. Yang kedua sumber daya, indikator keberhasilan sumber daya adalah staf, dan informasi, wewenang dan fasilitas. Implementasi kebijakan agar berhasil harus dilaksankan oleh stafyang memadai dan berkompeten, informasi yang jelas tentang caramelaksanakan kebijakan. Wewenang harus bersifat formal agar perintah dapatdilaksanakan serta fasilitas pendukung harus memadai agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Yang ketiga disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan akan efektif bila para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakanya. Hal yang perlu dicermati dalam variabel ini adalah pengangkatan birokrat, dimana pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya insentif, dengan cara menambahan keuntungan. Bagi pelaksana kebijakan, akan mendorong mereka untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Yang keempat struktur organisasi, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang,oleh karna itu diperlukan struktur birokrasi yang kondusif agar tidak menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan cara melakukan koordinasi dengan baik dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi adalah Standar Operating Prosedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

 Empat variabel yang menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut dianggap cocok untuk menjawab permasalahan-permasalahan terhadap pelaksanaan atau implementasi dari program Wirausaha Baru (WUB), serta diharapkan dengan adanya hal itu pelaksanaan wirausaha baru di Provinsi Jawa Barat khususnya di kota Bandung dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari program wirausaha baru tercapai. baik dan tujuan dari program wirausaha baru tercapai.

**1.6 Proposisi**

 Peneliti memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Wirausaha Baru di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pengimplementasian kebijakan wirausaha baru di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Provinsi Jawa Barat, guna untuk terwujudnya tujuan organisasi tersebut yang telah ditetapakan sebelumnya.

 Sedangkan dimensi kinerja disini yang akan diterapkan dalam upaya penertiban parkir, ialah Menurut model **George C.Edwards III** yang dikutip oleh **Agustino (2008:141)** dalam bukunya **“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”** model ini disebut **Direct and Indirect Impact on Implementation.** Dalam pendekatan ini terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan
4. Struktur Birokrasi

**1.7 Lokasi dan Lamanya Penelitian**

**1.7.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dilemabaga pemerintahan provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
2. UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Provinsi Jawa Barat

**1.7.2 Lamanya Penelitian**

Lamanya peneltian selama 6 bulan.Terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018.Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada gambar jadwal penelitian.aHHHHH